



Analisis Teks Pancasila dalam Perspektif Dimensi Dakwah Kebangsaan

**Sarkawi^{1*}, Zainal Arifin², Budi Hermanto³, Mahmud Yunus Daulay⁴,
Zulham⁵ & Yolanda Rakatiwi⁶**

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

**sarkawisingkil@gmail.com*

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut ideologi negara dengan sistem terbuka, kondisi masyarakat yang majemuk dan multikultural, berbagai ras, suku, etnis dan agama. Setidaknya ada enam agama yang diakui oleh negara Indonesia. Akhir-akhir ini sering muncul pendapat yang menyebutkan adanya pemisahan agama dengan Pancasila, hal ini menarik untuk dilakukan kajian lebih lanjut. Apakah Pancasila bertentangan dengan agama? Melalui studi analisis teks Pancasila dalam perspektif dakwah, penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Melalui pendekatan historis serta analisis isi dengan cara mencari dan mengumpulkan literatur dan referensi yang berkaitan dengan tujuan dan fokus penelitian. Sumber data didapatkan melalui buku, jurnal dan juga pengamatan dalam film dokumentar. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, setidaknya dapat disimpulkan bahwa teks Pancasila yang dirumuskan oleh para tokoh bangsa termasuk para Ulama, bahwa kelima sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai dakwah yang sangat istimewa dan makna-makna yang mendasar dan prinsipil dalam ajaran Islam, baik ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan hikmat kebijaksanaan, serta keadilan merupakan hal yang penting untuk dilakukan dan merupakan ajaran dalam agama Islam.

Kata Kunci: Analisis teks; Pancasila; Islam; perspektif dakwah.

ABSTRACT

Indonesia is a unitary state that adheres to the state ideology with an open system, a pluralistic and multicultural society, and various races, tribes, ethnicities and religions. The Indonesian state recognizes at least six religions. Lately, opinions have often emerged that mention the separation of religion from Pancasila; this is interesting to do further study. Does Pancasila conflict with religion? This research was conducted through a literature study that analyzed the Pancasila text from the perspective of preaching. Through a historical approach and content analysis, literature and references related to the objectives and focus of the research are searched for and collected. Data sources were obtained through books, journals, and observations in documentary films. Based on the discussion conducted, it can at least be concluded that the Pancasila text formulated by national figures, including Ulama, that the five principles in Pancasila contain exceptional preaching values and fundamental and principled meanings in Islamic teachings, both divinity, humanity, unity, democracy and wisdom, and justice are essential things to do and are teachings in Islam.

Keywords : *Text analysis; Pancasila; Islam; da'wah perspective.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan, yang memiliki ragam suku, agama, ras dan bahasa. Kemajemukan ini membuat Indonesia menjadi salah satu Negara yang memiliki kekayaan. Indonesia merdeka pada tahun 1945 dengan perjuangan yang begitu berat yang dilakukan oleh para pahlawan negara agar dapat menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Setelah merdeka para pemimpin bangsa membuat dan merumuskan dasar negara termasuk naskah pancasila yang memiliki lima sila yang menjadi bagian dasar yang penting dalam mengelola Negara Indonesia. Hal ini tentunya memiliki makna dan tujuan yang besar, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dengan baik (Alim, 2019). Dalam hal asimilasi budaya, perjalanan negara yang amat panjang, termasuk bagaimana Islam menjadi agama yang mayoritas bagi masyarakat Indonesia secara bertahap mampu menguasai masyarakat

Perkembangan teknologi dan sistem terbukanya informasi dan kebebasan dalam memberikan pandangan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam memberikan pandangan terhadap kondisi bangsa saat ini. Dampak dari perkembangan era digital ini tentu memberikan perubahan bagi kehidupan manusia (Sarkawi, 2021). Kendati Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar sekaligus ideologi bangsa Indonesia (Harahap & Yunus, 2021). Salah satu pengaruh yang dirasakan dengan hadirnya teknologi informasi adalah pergeseran paradigma dakwah konvensional (Rustandi & Hendrawan, 2022). dengan adanya sistem keterbukaan tersebut, tentunya setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda, apalagi adanya kelompok yang bisa saja muncul dan mencoba merusak tatanan Pancasila, yang seakan-akan memberikan pandangan bahwa pancasila merupakan sebuah Filosofi yang dimaknai tidak ada kaitannya dengan agama. Bahkan realita akhir-akhir ini pernah muncul pemahaman bahwa pancasila harus dipisahkan dengan agama, sehingga ada yang mengatakan kelompok agamis berbeda dengan nasionalis. Dewasa ini, harus di akui, betapa hebatnya media mengubah tatanan kehidupan masyarakat dengan mudah dan cepat (Ghofur, 2019).

Padahal harus di akui bahwa pancasila merupakan simbol negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi dasar negara dalam mengelola, mengatur dan menjalankan roda pemerintahan. Seperti yang telah dimaklumi, bahwa pancasila lahir pada tahun 1945 yang merupakan hari proklamasi kemerdekaan tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia dirumuskan setelah melalui musyawarah beberapa tokoh bangsa Indonesia, yang di dalamnya terdapat lima sila. Dalam Pancasila, agama menduduki peranan penting dalam rangka membangun sebuah bangsa dan negara, begitu pula dalam hal pelaksanaan serta pengamalan nilai-nilai luhur pancasila itu

sendiri (Kurniana et al., 2023).

Sebagaimana dipahami bahwa pancasila merupakan kekuatan dan sumber hukum yang kuat bagi negara Indonesia namun dengan tidak mengesampingkan agama dalam mengelola pemerintahan Indonesia. Terlebih lagi masyarakat Indonesia merupakan penduduk yang mayoritas beragama Islam, dan ulama serta santri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan kemerdekaan negara Indonesia. Termasuk dalam perumusan pancasila adanya keterlibatan ulama, sehingga menarik untuk digali dan dikaji nilai-nilai agama yang terkandung didalamnya, terutama yang merupakan fokus penelitian ini adalah nilai dakwah. Kondisi umat dewasa ini semakin kompleks dan memiliki tantangan secara menyeluruh dengan adanya sistem modernisasi (Sarkawi, 2023).

Keterlibatan ulama dalam perumusan pancasila tentu memiliki pertimbangan yang kuat dan baik dalam merumuskan pancasila dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai agama. Penelitian tentang nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam tentu sangat luas, karena Islam mencakup dari berbagai aspek yang berbeda dan dibutuhkan kajian lebih luas (Muhlis et al., 2022). Terlebih lagi Islam telah memberikan tuntunan kepada umatnya bahwa Al-Qur'an merupakan sebuah kitab menjadi pedoman serta menjadi petunjuk bagi orang bertaqwa, Hal ini telah dijelaskan di awal surat Al-Baqarah "Kitab ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa" karena Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan kepada nabi, maka segala permasalahan dalam kehidupan, baik kehidupan didunia maupun kehidupan akhirat telah jelas dan tercantum semua dalam Al-Qur'an.

Perumusan pancasila dapat dipahami bahwa para tokoh bangsa yang mengusung dan merumuskan Pancasila. Masing-masing memberikan pandangannya, sehingga pada dasarnya masing-masing dari mereka yang merumuskannya, memiliki gagasan yang berbeda, bahkan sebagian menganggap, burung garudanya sebagai lambang Pancasila merupakan jenis kemusyrikan dan bahkan dapat disebut sebagai thagut (Khatimah, 2006). Namun yang pasti semua perumus menyampaikan gagasan dengan pertimbangan yang matang dan dianggap baik, serta memiliki kearifan dan nilai-nilai filosofis yang tinggi di dalamnya. Sehingga dari perjalanan tersebut ditemukan dan disepakatilah sila dalam Pancasila.

Dari latar belakang tersebut, perlu menjadi bahan kajian dan menarik untuk dilakukan penelitian lebih dalam tentang kedudukan pancasila dalam islam serta hubungannya dalam perspektif dakwah ditengah maraknya informasi dan pemahaman yang begitu ramai pada saat sekarang ini. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan pendekatan sejarah serta mencari berbagai literatur dan sumber yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dari sumber ilmiah maupun sumber-sumber lainnya, yang memiliki korelasi untuk dijadikan rujukan, baik berupa buku, jurnal, film dokumenter dan lain-lain. Fokus penulisan penulis

dalam penelitian ini, untuk melihat dan menganalisa Pancasila dalam perspektif Islam yang terkandung dalam kelima sila Pancasila, dimana tujuan penelitian ini, untuk mengetahui apakah teks Pancasila bertentangan dengan Islam, dan bagaimana teks Pancasila dalam perspektif dakwah.

Secara teori Pancasila yang dirumuskan tentu berdasarkan asa filosofi yang mendalam dari para perumus tersebut. Dengan pertimbangan yang kuat dan tentunya memerlukan pemikir yang bijak dan memiliki keahlian dari segi keilmuan untuk membaca kepentingan bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, Pancasila kini menghadapi tantangan yang sedikit sulit. Nilai luhur Pancasila semakin terkikis, baik dalam tata kelola pemerintahan maupun dalam praktek kehidupan bermasyarakat (Darmanto, 2023). Ketertarikan untuk mengkaji masalah tersebut dengan motivasi bahwa negara Indonesia yang merupakan negara mayoritas beragama Islam. Kemudian para perumus Pancasila yang merupakan tokoh-tokoh agama termasuk para ulama. Terkait dengan penelitian tentang Pancasila telah banyak ditemukan dalam berbagai artikel dan penelitian ilmiah, diantaranya adalah:

Susanto yang menulis Pancasila sebagai identitas dan nilai luhur bangsa. Analisis peran Pancasila sebagai modal sosial bangsa dan negara, fokus dalam penelitian ini lebih spesifik pada peran nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan bangsa dan negara. Selanjutnya tulisan Ratna Sari dan Fatma Ulfatun Najicha menganalisis pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, penelitian ini juga cenderung pada efek yang dihasilkan oleh rumusan-rumusan yang ada terhadap masyarakat. Nela kurniana menganalisis sejarah perumusan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kesimpulannya setidaknya dapat dimaknai, bahwa Pancasila dirancang sebagai ideologi dan prinsip dasar seluruh warga negara Indonesia, hasil dari banyak pertimbangan dan analisis yang dirumuskan oleh dewan sembilan yang terdiri dari ulama, kiai, dan nasionalis dalam kongres BPUPKI.

Penulis meyakini masih banyak tulisan-tulisan yang mengkaji tentang Pancasila, namun yang lebih spesifik terkait dengan kedudukannya dalam Islam dalam perspektif dakwah belum ditemukan. Apalagi secara spesifik nilai dakwah yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas tentang kandungan teks Pancasila, hal ini tidak terlepas karena para perumus Pancasila tentu memiliki alasan dan dasar tertentu, sehingga menyepakati kelima sila yang tercantum dalam Pancasila.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan melalui pendekatan kualitatif, serta analisis teks. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema, konsep, dan kandungan ajaran Islam yang terdapat dalam teks Pancasila dan kedudukannya pada nilai-nilai ajaran Islam, serta dalam perspektif dakwah. Melalui pendekatan historis dan filosofis yang terkandung

dalam teks pancasila, yang berkaitan erat dengan penelitian ini, sebelum melakukan analisis, penulis terlebih dahulu menelusuri literatur- literatur dan sumber-sumber yang berhubungan dengan fokus penelitian ini, baik sumber buku, sumber jurnal, film dokumenter dan lainnya, yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, untuk kemudian melakukan analisis terkait nilai-nilai dakwah dalam teks pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara adalah kumpulan dari sekumpulan orang yang dikelola oleh penguasa atau pemerintah, baik yang berbentuk demokrasi maupun yang lainnya. Istilah negara menurut para ahli memiliki ragam pengertian, karena negara merupakan wilayah pemerintahan yang sangat luas dan model pengelolaan yang berbeda-beda, sehingga pemahaman yang berbeda merupakan sebuah keniscayaan, apalagi pemahaman tersebut juga dapat dipahami dari berbagai sudut pandang keilmuan. termasuk juga kondisi masyarakat yang berbeda-beda. Keragaman pemikiran tersebut tentunya dapat menambah wawasan, bahkan dapat saling melengkapi juga saling memberikan pemikiran antara satu dengan yang lain, sehingga persepsi tentang negara menjadi lebih dinamis dan berkembang (Usman, 2015).

Dalam mengelola sebuah pemerintahan negara tentunya harus mengedepankan seluruh kepentingan elemen bangsa, namun disisi lain Negara Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk yang majemuk menjadi keuinkan dan pertimbangan dalam perumusan dasar negara, hal ini agar dapat mengakomodir seluruh kepentingan bangsa yang lebih baik, dan hal ini pula yang menjadi pertimbangan para perumus dasar negara yang diyakini memiliki nilai dan asas yang baik. Prinsip tersebut telah dituangkan dalam pancasila yang dipahami sebagai dasar negara. Pancasila terdiri dari lima sila yang mengandung makna tersendiri. Sistem pancasila lainnya yang umum dikenal adalah *s i s t e m* filsafat, adanya sistem ini diharapkan warga negara Indonesia dapat saling menghormati dan menghargai satu sama lain (Sari & Najicha, 2022).

Dasar negara yang tercantum dalam pancasila terdapat lima poin yang memiliki nilai filosofis yang tinggi, karena ini merupakan rumusan yang dibuat oleh para tokoh bangsa dan termasuk para ulama di dalamnya. Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisa nilai dakwah yang terdapat dalam lima sila teks pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia yang dapat dianalisa sebagai berikut:

Nilai Ketauhidan dan Semangat Dakwah Kebangsaan

Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dinyatakan sebagai dasar negara, dalam hal ini semua agama memiliki keyakinan yang berbeda-beda, namun demikian masalah ketuhanan tidak perlu diperdebatkan dalam hal ini, sehingga dapat tercipta kondisi kebangsaan yang baik dan tidak menimbulkan masalah

tentang keyakinan, karena masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang multikultural dan berbagai keyakinan tentu berpotensi menimbulkan konflik, sehingga rumusan ini menjadi rumusan yang khusus dan diposisikan pada urutan yang pertama pula. Secara hirarkis nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak (Rohmah, 2019).

Jika dikaitkan dengan dakwah, prinsip ini dapat dianalisa sebagai prinsip dasar dan utama. Al-Qur'an yang merupakan sumber pedoman utama bagi umat Islam secara tegas dan jelas menyebutkan masalah ketuhanan yang terdapat dalam surat Al Ikhlas dan surat lainnya, Al-Qur'an juga menjelaskan, pada dasarnya semua jin dan manusia diciptakan untuk menyembah-Nya dan mengagungkan Allah SWT, perintah ini menunjukkan bahwa hal tersebut haruslah menjadi prioritas dan menjadi misi utama dan pertama dari para nabi dan rasul kepada umat dan bangsanya, Selain perintah untuk menyembah Allah, prinsip yang paling utama sebelum menyembah-Nya adalah mengesakan tuhan sang pencipta, hal ini dapat dilihat pada ayat pertama surat Al-Ikhlas - *قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* - yang berarti perintah kepada Muhammad untuk mengatakan bahwa Tuhan itu Satu. Karena pada dasarnya berdakwah merupakan kewajiban yang ditetapkan Allah kepada umat manusia (Yusuf et al., 2023).

Suksesnya dakwah Rasulullah Saw terhadap kaum Jahiliyyah merupakan indikator dari keberhasilan praktik dakwah (Ronaldi et al., 2023). Di mana Rasul melakukan berbagai terobosan untuk dapat mengajak kaum kafir qurays agar beriman dan bertauhid kepada Allah SWT, dengan menjelaskan berbagai pemahaman tentang kedudukan Tuhan sang pencipta. Dalam pelaksanaan dakwah Rasulullah yang utama adalah mengajarkan nilai-nilai tauhid, sebagaimana para Nabi sebelumnya juga memiliki misi risalah untuk mengesakan sang pencipta.

Dalam riwayat Imam Ahmad menjelaskan orang-orang musyrik pernah meminta kepada Nabi tentang silsilah Allah, sehingga turun ayat Al Ikhlas yang menyebutkan, "Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa" (Ghoffar, 2005). Memaknai dasar negara yang disebutkan sebagai sila pertama adalah ajakan untuk bertauhid, ajakan untuk bertauhid atau mengesakan sang pencipta merupakan misi kerasulan. Sila pertama ini harus diakui adalah bagian dari cerminan serta ajaran dari agama Islam (Rohman, 2013). Dasar ini pula yang menjadi dasar negara Republik Indonesia, dengan demikian dapat dan harus diakui betapa hebatnya para perumus Pancasila telah menyusun dengan cermat. Bahwa negara tidak perlu mempermasalahkan masalah ketuhanan, dan merupakan unsur utama yang telah dicantumkan dalam sila pertama, yang telah diakui dan disepakati, untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sila pertama ini merupakan sila yang sangat mendasar bagi setiap manusia, karena tidak ada manusia yang tidak percaya untuk dapat hidup dan mengatur kehidupannya sendiri tanpa adanya kekuatan ghaib yang menjadi tempat berserah

diri, dan dengan sila ini pula seluruh masyarakat Indonesia diajarkan pentingnya nilai-nilai ketuhanan untuk dapat menjadi pribadi yang baik dan bersikap religius, meskipun tidak mengatasnamakan suatu agama, namun memiliki rasa kuat dan takut kepada sang pencipta, dan dengan hal ini pula sila ini menjadi prinsip yang sangat mendasar dalam membangun suatu peradaban dan bangsa menjadi baik.

Dalam artikel karya Arief Hidayat, ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sekaligus guru besar Universitas Diponegoro, penulis menjelaskan bahwa kuatnya dimensi ketuhanan dalam pemikiran para pendiri negara dalam mendirikan negara yang religius tercermin dan ditekankan setelah adanya kesepakatan perumusan dasar negara dan hal ini merupakan masukan dari Syekh Abbas kepada Soekarno yang menyatakan, "Negara yang akan didirikan kelak harus berdasarkan atas Ketuhanan "(Hidayat, 2018). Secara gamblang dapat dipahami bahwa perumusan Nilai ketuhanan dalam sila yang pertama merupakan misi utama dalam perspektif dakwah. Sehingga dapat memberikan pemahaman kepada semua elemen bangsa memahami betapa pentingnya nilai ketuhanan dan dengan pemahaman yang benar tentu akan mampu mengantarkan bangsa menjadi bangsa yang lebih baik pula.

Toleransi dan Interaksi Sosial dalam Dakwah Keberagaman

Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari toleransi antarumat beragama, di mana ini merupakan salah satu hal yang berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari (Marpuah, 2019). Implementasi dari toleransi dan interaksi sosial ini melahirkan suatu kebijakan yang seimbang. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial bukan hanya untuk saling memberikan kontribusi (Rahmawati, 2016).

Pada sila kedua disebutkan Kemanusiaan yang adil dan Beradab, menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk yang sama posisi dan kedudukannya di hadapan Allah. Dalam sebuah riwayat, ketika Bilal bin Rabbah ketika mengumandangkan azan, mendapat ejekan dari kafir Qurays, maka turun penegasan bahwa manusia yang berbeda bukan untuk saling menjelekkkan. Tetapi untuk saling mengetahui suku dan bangsanya saja, bila dikaitkan dalam sebuah negara khususnya Indonesia, tidak ada perbedaan dalam memperoleh hak-hak sebagai warga negara, baik hak pendidikan, termasuk hak pelayanan dan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bahwa rakyat Indonesia tidak ada perbedaan di sisi hukum, sehingga dapat tercipta keadilan serta bermartabat.

Keistimewaan seseorang tidak dapat diukur oleh manusia, namun yang mengukur adalah Tuhan, hal ini juga merupakan amanat dalam sila kedua bahwa masyarakat yang berbeda suku, ras, etnis dan gaya hidup tidak serta merta membuat seseorang menjadi istimewa dalam sebuah negara, sehingga kesetaraan yang diajarkan oleh bangsa merupakan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi

Muhammad SAW. Sementara Nilai kedua dari point ini menunjukkan. Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan baik bila selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan (Rohmah, 2019).

Jika dihayati dan direnungkan rumusan dan posisi sila kedua ini, yang tersusun secara teratur dan baik, tentu memiliki makna yang dalam dalam sebuah sistem nilai, termasuk nilai-nilai dakwah. Setelah pada sila pertama menyebutkan ketuhanan Yang Maha Esa, dan ini adalah "*Hablumminallah*", yaitu urusan dan hubungan manusia dengan Allah sebagai pencipta. Sedangkan pada sila kedua prinsip yang diajarkan adalah prinsip "*Hablumminannas*". Setelah para perumus menyepakati urutan pertama adalah bentuk hubungan dengan Allah, maka pada sila kedua ternyata tidak kalah pentingnya diperlukan hubungan antar manusia. Hal ini tidak menjelaskan hubungan antar agama, karena Indonesia merupakan negara yang multikultural dan memiliki banyak suku, bahasa, ras dan agama yang berbeda, namun penjelasannya lebih kepada prinsip kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan penegasan Al Qur'an dalam surat Al-Hujarat ayat 13 bahwa menciptakan manusia memiliki makna agar saling mengenal satu dengan yang lain.

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti".

Penulis mengutip penjelasan dari Tafsir Ibnu Katsir bahwa dari sisi kemuliaan, semua manusia dilihat dari sisi kemanusiaannya dengan Adam dan Hawa' adalah sama. Hanya saja kemudian mereka bertingkat-tingkat jika dilihat dari aspek agamanya, yaitu ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, setelah adanya larangan menggunjing dan mencaci maki antar sesama, Allah menyetarakan mereka dalam hal kemanusiaan (Al-Syaikh, 1994).

Dalam sebuah hadist Sahih Muslim yang diriwayatkan dari abu Hurairah Rasulullah bahkan menegaskan bahwa Allah tidak melihat fisik dan kekayaan seseorang, namun yang menjadi penilaian di mata Allah adalah Amal Shaleh yang dilakukan. Hal ini menunjukkan betapa manusia itu sama derajat dan kedudukannya, dihadapan Allah sebagai pencipta apalagi manusia dengan manusia itu sendiri, tentu tidak boleh terkotak-kotak, dan hal ini juga menjadi dasar negara yang tertuang dalam Pancasila.

Perintah untuk saling menghormati, dan saling mengenal merupakan perintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum konstitusi negara ini dibuat, ternyata Al-Qur'an mengajarkan untuk menerapkan asas kemanusiaan, dan hal ini juga mengandung nilai dakwah yang tinggi. Karena pada dasarnya, manusia yang merupakan makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri tentu saling

mebutuhkan satu sama lain. Dengan demikian kekayaan yang dimiliki oleh Negara Indonesia merupakan suatu kebanggaan dan kemewahan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, namun dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam perspektif Islam ajakan kepada saling menghormati itu pula merupakan ajaran yang sangat penting untuk ditanamkan ditengah-tengah masyarakat. Pada masa Rasulullah, selain dakwah untuk mengajak umat kepada ketauhidan, Rasulullah mendakwahkan kepada umatnya untuk memberikan hak kepada setiap orang dan tidak membeda-bedakan. Sebagaimana rasul mencontohkan dalam dakwah nyata yang menerima semua kalangan dan menghargai setiap orang dari suku apapun ditengah-tengah perjalanan dakwahnya. Seperti sikap rasul ketika meletakkan Hajar Aswad ketika terjadi pergeseran dengan merangkul semua kafilah sehingga tidak ada yang merasa diasingkan. Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dan sosial dapat di pengaruhi dan merupakan perwujudan dakwah Islam (Rosidi et al., 2023).

Indonesia yang mengakui enam agama, tentunya masyarakat dituntut untuk memiliki sikap toleransi dan saling menghormati diantara sesame. Dalam Al-Qur'an, pada surat Al kafirun mengajarkan bagaimana seharusnya dalam bersosial diantara kehidupan masyarakat. Perlu ditanamkan barangkali menjadi dasar dalam merumuskan sila tersebut, bagaimanapun juga kehadiran agama yang beragam bagi masyarakat menjadi sebuah keharusan untuk saling menerima diantara sesama.

Islam dalam perspektif dakwah tidak memaksakan untuk memeluk satu agama tertentu, bahkan secara gamblang disinggung pula dalam Al-Qur'an "tidak ada paksaan dalam Agama". Bahkan adanya larangan untuk menghina sesembahan orang lain, jika tidak mau oranglain menghina Allah sebagai pencipta. Dengan demikian, jika dimaknai dengan baik, maka toleransi menjadi suatu keharusan ditengah keragaman bangsa.

Menyikapi persoalan yang akhir-akhir ini seiring muncul di opini, yang terkadang adanya sekelompok masyarakat yang saling berkonflik atas nama agama, mengantarkan pemerintah dengan segala kebijakannya yang didasari pula dengan adanya ketentuan dalam Pancasila. Saat ini sedang menggalakkan apa yang disebut dengan Moderasi beragama, dalam istilah Islam hal ini pula disebut dengan "*Wasatijab*", sehingga bila dihayati dengan baik, dalam konsep dari nilai keberagaman ini merupakan misi dakwah yang harus ditanamkan.

Bersatu Padu dalam Diversitas Kemanusiaan

Indonesia mempunyai rangkaian sejarah panjang dalam hal asimilasi budaya (Alim, 2019). Kebijakan pemerintah saat ini dalam hal Moderasi beragama

merupakan bagian dari kehadiran pemerintah untuk mengatasi dan mengimplementasikan bagaimana pentingnya bersatu pada dalam diversitas kemanusiaan. Budaya yang begitu beragam di Indonesia saat ini tengah digalakkan untuk dapat saling menerima diantara sesama, suku bangsa yang beragam menjadi keistimewaan tersendiri bagi bangsa. Melalui kebijakan moderasi beragama saat ini, telah dapat disaksikan betapa masyarakat mulai memahami variasi dan perbedaan diantara sesama, karena dengan ini kebangkitan sebuah negara dari keterpurukan akan dapat lebih cepat.

Kemerdekaan Indonesia, bukan dengan "*sinsalabin abrakadabra*". Kemerdekaan Indonesia merupakan buah dari kerja keras dan semangat para pendiri bangsa, baik dari para tokoh agama, tokoh intelektual dan lainnya yang mampu merebut Indonesia dari tangan penjajah pada saat itu. Hal ini tak lain merupakan usaha yang dilakukan oleh para pejuang bangsa dengan tetap menjaga kebersamaan dan persatuan, serta mengharap pertolongan dari Allah SWT sehingga mampu mendapatkan hasil yang baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan faktor terpenting dalam meraih kemerdekaan. Sehingga hal ini menjadi prinsip negara yang penting dan tertuang sebagai sila ketiga.

Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang paling penting untuk memenuhi sebuah misi baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Persatuan dan kesatuan ini memiliki nilai yang istimewa untuk menjadikan bangsa yang kuat dan bangsa yang bermartabat. Tidak akan ada keberhasilan dalam sebuah usaha, melainkan dengan kekompakan dan persatuan juga. Simbol yang digunakan dalam sila ketiga ini adalah gambar pohon beringin, bagaimana pohon ini memiliki filosofi yang tinggi dan istimewa, dan juga dalam sila ini merupakan bentuk jaminan bagi bangsa Indonesia untuk dapat melakukan kerjasama, dan menyatukan visi dalam membangun bangsa merupakan faktor yang paling utama juga, sehingga dapat menghantarkan Negeramenjadi bangsa yang bermartabat.

Sila ketiga dalam Pancasila ternyata mengandung makna yang sangat luas, keutuhan dalam ideologi, kehidupan, sosial dan tertuang dalam Al Qur' an. Bagaimana bangsa ini perlu berdiri tegak dalam persatuan dan kesatuan untuk memperoleh, mempertahankan dan mensejahterakan rakyatnya sendiri, nilai dakwah yang terkandung di dalamnya selaras dengan penjelasan Al-Qur'an surat Ali Imran: 105 sebagai berikut:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ - ١٠٥

Artinya "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang penjelasan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih"

Ayat ini, menekankan betapa pentingnya meningkatkan persatuan, dan

larangan untuk saling berpecah belah, berbicara mengenai persatuan ini. Dalam tafsir rahmat dijelaskan setidaknya hal yang penting dipahami diantaranya: Pesan pertama dalam ayat ini adalah persatuan, dan ini merupakan ajaran Islam, karena dalam mencapai sebuah kesuksesan dan kemenangan perlu adanya persatuan. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari persatuan, selain merupakan anugerah dari Allah SWT. "Persatuan" yang menjadi salah satu sila dalam Pancasila mampu menjadi penyemangat dan motivasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan (Mukhtar & Hamidah, 2021).

Kedua, larangan untuk berpecah belah, tidak bersatu bukan berarti pecah, namun perpecahan dalam suatu kelompok akan menimbulkan bencana. Namun harus tetap kompak dan tidak berselisih, untuk itu dalam mengatasi berbagai macam perbedaan dibutuhkan seorang pemimpin sebagai pemersatu bangsa juga. Dan ini juga merupakan bagian terpenting dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selain persatuan dalam sebuah kelompok, dalam kegiatan dakwah juga perlu adanya kebersamaan dan persatuan. Dalam tafsir Ramat yang penulis kutip menjelaskan perlunya mengorganisir persatuan para dai. Organisasi yang kuat dan teratur harus dibentuk untuk berdakwah. Satu kelompok (dalam jumlah tertentu) umat Islam dikhususkan untuk berdakwah yang diatur secara konseptual, kapan, di mana dan bagaimana cara berdakwahnya, sehingga mencapai hasil yang maksimal (Bakry, 1983).

Ketiga poin di atas memberikan gambaran dalam sistem pengelolaan negara juga telah diterapkan. Sebagaimana Indonesia ditebus dengan adanya persatuan dan kesatuan, serta bagaimana Negara dapat menjadi bermartabat dan berwibawa, ketika bangsa ini tetap bersatu dalam mengelola pemerintahannya. Bentuk persatuan juga disebutkan dengan adanya sebuah organisasi. Dalam hal ini Negara yang dipimpin oleh seorang penguasa, hal ini adalah Presiden yang menugaskan para mubaligh atau menterinya, dengan konsepsi tersebut, bagaimana dan kemana kebijakan harus dijalankan, sehingga pembangunan Masyarakat baik dalam membangun jiwa dan raganya.

Bila dikaitkan dengan dakwah, nilai persatuan untuk mencapai keberhasilan sebuah misi merupakan salah satu faktor penentu. Kekalahan Rasulullah ketika perang uhud, merupakan salah satu bentuk adanya perpecahan yang mengantarkan kepada kekalahan. Hal ini karena melanggar amanah dari Rasulullah yang mengamanhakan untuk tetap kompak dan bersatu sesuai dengan instruksi yang disampaikan.

Demokrasi dan Terbuka sebagai Semangat Dakwah Multikultural

Redaksi dari sila ke-4 Pancasila adalah "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Dapat dipahami bahwa sebuah kepemimpinan harus mengedepankan hikmat dan kebijaksanaan. Begitu

pula dalam hal penyelesaian suatu permasalahan bangsa, perlu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat melalui Dewan perwakilan rakyat yang menjabat di lembaga Perwakilan rakyat. Hal ini bertujuan untuk memperjuangkan hak hak rakyat yang merupakan amanat dari rakyat itu sendiri (Yusdiyanto, 2017).

Inti dari prinsip ini adalah demokrasi. Demokrasi berarti memiliki hak dan kedudukan yang sama antara satu dengan yang lain, tidak ada perbedaan dalam bernegara. Hal ini juga merupakan anjuran dan ajaran dalam agama, bahwa manusia tidak ada bedanya di hadapan sang pencipta kecuali prestasi yang dimiliki. Musyawarah, yaitu mengambil keputusan dengan suara bulat. Dengan adanya musyawarah, maka setiap orang yang turut bermusyawarah akan berupaya menyampaikan pendapat terbaik, sehingga ditemukan pandangan yang bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi (Sarkawi & Ahmad, 2022).

Musyawarah merupakan sebuah mufakat yang dianjurkan dalam Islam, dimana Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk memusyawarahkan suatu hal dengan baik. Sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan tidak ada yang dirugikan, diantaranya terdapat dalam Surat As-syu'ara ayat ke 38 yang menjadi dasar dari musyawarah.

Dalam tafsir rahmat karya Oemar Bakry menjelaskan makna dari ayat ini, menjelaskan karakter nabi Muhammad Saw, yang merupakan sebagai rahmat yang besar bagi bangsa Arab dan seluruh umat manusia. Di antara sifat-sifat tersebut (1) ramah dan lemah lembut terhadap orang beriman; (2) tidak keras hati, dan terbuka. Suka bermusyawarah dalam berbagai urusan; 3) adil, dan tidak serakah dalam hal harta ghanimah dan sebagainya; dan (4) menyampaikan ajaran Al-qur'an, agar umat keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cuaca yang terang benderang yaitu keimanan dan ketakwaan (Bakry, 1983).

Jika dikaitkan dengan kondisi bangsa, maka dapat dikaitkan, bahwa Nabi Muhammad yang merupakan seorang pemimpin, mengedepankan keadilan, kebijaksanaan dan juga mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan dalam membangun bangsa. Beliau sendiri menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Hal ini ternyata menjadi sebuah keniscayaan dalam memimpin umat dan bangsa, termasuk negara. Sehingga berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, akan mampu mengantarkan bangsa menuju kemakmuran.

Dalam kaitan dengan kebijakan kedakwahan, multikulturalisme merupakan konsep sosial yang diintrodusir ke dalam kegiatan dakwah (Fikri, 2018). Kekayaan negara Indonesia dari sisi ragam dan bahasa sesungguhnya mampu memperkaya khazanah dan pengalaman dalam pelaksanaan dakwah. Bagaimana dalam Islam, agama mengajarkan untuk adanya keterbukaan dan kejujuran, tidak ada yang perlu ditutupi, karena dengan terbuka maka semua orang akan merasakan kedamaian dan ketentraman. Namun sebaliknya bila ada yang ditutupi akan dapat membawa petaka bagi pelaksanaan dakwah, begitu pula dalam konsep keneragaan. Ulama

memandang bahwa poin ini merupakan penting untuk disampaikan kepada masyarakat luas, serta diimplementasikan sesuai dengan misi dakwah Islamiah.

Kesetaraan Manusia dan Semangat Dakwah Moderat

Konflik yang sedang terjadi diberbagai belahan dunia, menjadi perhatian bagi semua negara termasuk Indonesia. Kepedulian diantara sesama, yang mengajarkan bagaimana pentingnya menanamkan nilai sosial dalam kehidupan dan keberagaman. Perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk melakukan sebuah kebaikan, pentingnya sikap saling menghargai sebagaimana diajarkan oleh agama dapat menjadi asbab sebuah kebangkitan dan kemakmuran.

Pada sila kelima amanat yang sangat dalam, sila ini menganjurkan untuk bersikap adil, adil dalam arti luas, disebutkan sosial, sosial sendiri memiliki arti yang luas. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia sosial ini berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan kemasyarakatan, baik dari segi agama, kebudayaan, kemanusiaan, keadilan, hukum, harus menyeluruh dan merata tanpa ada perbedaan antar warga negara. Tidak ada warga negara yang berkelas dan tidak berkelas, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam negara kesatuan republik Indonesia. Dengan kata lain, seluruh rakyat baik yang ada di wilayah Republik Indonesia maupun yang berada di negara lain yang berasal dari Indonesia (Purwanto, n.d.).

Menurut Hadi (dalam Rianto, 2016), sila kelima ini mengandung nilai persamaan kedudukan dalam kewajiban serta hak, pada dasarnya manusia memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya masing-masing (Lestari et al., 2021). Dengan itu, dapat diartikan juga bahwa setiap masyarakat harus diberikan pendidikan bagaimana kedudukan masyarakat antara satu dengan yang lainnya, dalam berhubungan satu sama lain. Sehingga tercipta kerukunan dalam sebuah bangsa, tidak akan menimbulkan efek perpecahan karena tidak ada warga negara yang diistimewakan dan yang lainnya, saling menghargai antar sesama, baik antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama yang berbeda dengan pemerintah.

Semua kelompok masyarakat mengharapkan adanya keseimbangan dalam sebuah pemerintahan baik di tingkat desa, daerah, maupun negara, dan hal ini juga menjadi fokus penting dalam sila kelima. Sebagaimana dimaklumi bahwa bangsa Indonesia yang beraneka ragam sosialnya memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap keistimewaannya bagi bangsa-bangsa lain. Bagaimana bangsa Indonesia yang mampu mengelola Indonesia dengan penuh keadilan dan kesetaraan akan mampu memperoleh dan mengangkat harkat dan martabat bangsanya. Sehingga hal ini juga telah diatur dan dituangkan dalam sila kelima yang merupakan dasar Negara

Munculnya pemisahan strata antara raja dengan rakyat seringkali

menimbulkan diskriminasi sosial sebagaimana yang terjadi di Perancis (Barir, n.d.). Dalam perspektif Islam, Rasul dan para khalifah menunjukkan sikap bagaimana manusia itu setara. Rasul dalam hal membangun masjid, umpamanya, turut serta dan tidak ada merasa orang yang istimewa, begitu pula apa yang dicontohkan Khalifah Umar ibn khattab yang salah satu khalifah yang masyur dikenal dengan keadilannya.

Kondisi ini juga telah dijelaskan dan diajarkan dalam Islam, bagaimana setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan memiliki kesetaraan dalam beragama. Sedangkan dalam tatanan pemerintahan bagaimana mengatur bangsa menjadi satu kesatuan dan memiliki kedudukan dan posisi yang sama pula, baik dalam perspektif hukum, agama, sosial dan lainnya. Kesetaraan dalam agama berarti kesetaraan secara keseluruhan, dan yang membedakan hanyalah prestasi yang dilakukan oleh setiap orang untuk mencapai derajat yang istimewa di hadapan Allah SWT, seperti yang dapat dilihat dalam Al Surat An-Nur ayat 22

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ - ٢٢

Artinya: "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai harta yang banyak di antara kamu bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah kamu menjadi pemaaf dan penyabar. Tidakkah kamu menyukai bahwa Allah memaafkan kamu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya kesejahteraan fakir miskin dan menjadi tanggung jawab penting bagi bangsa, agar tidak ada warga negara yang hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Selain itu, hal ini juga menjadi faktor penting yang menjadi perhatian pemerintah sesuai dengan anjuran agama yang memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya, karena negara memiliki kekayaan dan kemampuan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Konsep keadilan sosial yang dapat mencakup hak setiap warga negara, dari berbagai aspek termasuk hak untuk menganut keyakinan masing-masing dan perlindungan ekonomi, merupakan kewajiban negara memberikan hak yang sama bagi seluruh masyarakat begitu pula hak lainnya. Dengan kata lain, Pancasila relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman, akan tetapi tetap berada dalam paradigma atau hakikat yang sesungguhnya (Suryanto, 2023)

Untuk melihat bagaimana bagan yang didapatkan dari hasil kajian ini, berikut penulis tampilkan dibawah ini

Tabel 1
Analisis Teks Pancasila dalam Perspektif Dakwah

Sila Pancasila	Nilai Islam	Perspektif Dakwah
Ketuhanan Yang Maha Esa	Tauhid	Perintah Selalu Taat Kepada Pencipta
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Toleransi dan Interaksi Sosial	Perintah Saling Menghargai di antara Sesama
Persatuan Indonesia	Berpegang Teguh pada Ajaran Allah	Pentingnya Ukhuwah dan Persaudaraan
Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan	Demokrasi dan terbuka	Perlunya partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokratisasi
Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Kesetaraan Manusia	Pentingnya Mengatasi Kesenjangan Sosial

Sumber: Observasi Penulis, 2024

Tabel di atas dapat menjadi gambaran bahwa Pancasila merupakan bagian dari Nilai-nilai Islam, serta memiliki muatan dakwah yang begitu penting. Bahkan sebagai topik yang sangat perlu dilakukan untuk keseimbangan diantara sesama. Dengan demikian, bila pancasila dapat dilaksanakan sesuai dengan Nilai filosofi serta muatan islam dan dakwah didalamnya, maka dapat menjadikan Indonesia lebih damai, sejahtera dan tentram.

PENUTUP

Berdasarkan analisis, disimpulkan bahwa pancasila, sebagaimana dirumuskan oleh para tokoh bangsa termasuk para ulama, mengandung hakikat yang tidak berseberangan dengan ajaran Islam. Pancasila dapat dilihat sebagai landasan yang kuat dan sesuai untuk mengelola negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, serta mengakomodasi keberagaman yang ada di Indonesia.

Kelima sila Pancasila mengandung nilai-nilai dakwah yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan ajaran tauhid dalam Islam. Kemudian Sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan dalam Islam. Sila ketiga tentang Persatuan Indonesia menegaskan pentingnya persatuan, sebagaimana dalam ajaran Islam yang melarang perpecahan.

Sila keempat tentang Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung nilai-nilai demokrasi yang juga dihargai dalam Islam. Sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial, yang merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam. Dengan demikian, Pancasila dan Islam dapat berjalan seiring dalam membangun bangsa dan negara Indonesia yang harmonis dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syaikh, A. bin M. bin A. bin I. (1994). *Tafsir Ibnu Katsir*. Kairo: Beirut.
- Alim, S. (2019). Islam, Multikulturalisme, dan Pancasila, *Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*, 23(2), 85–99.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dakwah/article/view/13938>.
- Bakry, O. (1983). *Tafsir Rahmat*. Jakarta: Mutiara.
- Barir, M. (2014). Kesetaraan dan Kelas Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 15(1), 61–91. DOI:
<https://doi.org/10.14421/qh.2014.1501-04>.
- Darmanto. (2023). Integrasi Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Pancasila, *J-MPI*, 2(1), 3–4. <https://www.ejournal.stitmuhgawi.ac.id/index.php/J-MPI/article/view/95>.
- Ghofur, A. (2019). Dakwah Islam di Era Milenial, *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 5(2), 126–149.
<https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1557>.
- Ghoffer, A. M. A. (2005). *Tafsir Ibnu Katsir*. Kairo: Beirut.
- Hamdani Khaerul Fikri, D. wiradaningrat. (2018). Strategi dan Solusi Dakwah Pada Masyarakat Multikultural, *Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 11(1), 1–5.
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/mudabbir/article/view/316>.
- Harahap, A., & Yunus, M. (2021). Nilai-Nilai Pancasila dalam Orientasi Dakwah di Indonesia, *Transformasi*, 3(2), 56–76.
<https://transformasi.kemenag.go.id/index.php/journal/article/view/50>.
- Hidayat, A. (2018). Indonesia Negara Berketuhanan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 1–8.
https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_14_02_ariief_hidayat.pdf
- Khatimah, H. (2006). Penerapan Pancasila Perspektif Islam, *Tabdzib Al-Akhlak*, 3(2), 87. <https://uia.e-journal.id/Tahdzib/article/download/1037/586>.
- Kurniana, N., Karnandi, K. T., & Bustomi, M. Y. (2023). Sejarah Perumusan Pancasila Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 1(1).
<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/Lencana/article/view/>

865/855

- Lestari, P., Sunarto, S., & Cahyono, H. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Sila Kelima Dalam Pembelajaran, *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 7(2), 130–144. <https://doi.org/10.31571/sosial.v7i2.1880>
- Marpuah, M. (2019). Toleransi dan Interaksi Sosial antar Pemeluk Agama di Cigugur Kuningan, *Harmoni*, 18(2), 51–72. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.309>.
- Muhlis, S. N., Qadaruddin, M., & Values, I. (2022). Representasi Nilai Islam dalam Film Tarung Sarung, *Anida*, 22(2), 108–130. <https://doi.org/10.15575/anida.v22i2.20194>
- Mukhtar, & Hamidah, T. (2021). Pentingnya Nilai Persatuan Perpektif Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 103 dalam Mengatasi Pandemi Covid-19, *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, 17(02), 287–310. <https://doi.org/10.21009/jsq.017.2.07>
- Purwanto. (n.d.). Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Media Bakti*, 1(1). <https://journal.fhupb.ac.id/index.php/jhmb/article/view/2>.
- Rahmawati, R. F. (2016). Kaderisasi Dakwah Melalui Lembaga Pendidikan Islam, *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1), 147–166.
- Rianto, H. (2016). Implementasi Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Di Lingkungan Sekolah, *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 3(1), 80–91. <https://journal.ikipgripta.ac.id/index.php/sosial/article/view/268/265>
- Rustandi, R., & Hendrawan, A. (2022). Konstruksi Simbolik Mubaligh Pop pada Film Sang Pencerah, *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 22(1), 22–44. <https://doi.org/10.15575/anida.v22i1.18474>
- Rohmah, E. I. (2019). Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Dakwah, *Busyro: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 1(1), 96–110. <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/kpi/issue/view/20>
- Rohman, M. S. (2013). Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Pancasila, *Millah*, 13(1), 205–215. <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,40159-lang,id-c,kolom-t,Pancasi>.
- Ronaldi, A., Subhan, A., & Zamhari, A. (2023). Implikasi Dakwah Musabaqah Tilawatil Qur'an dalam Pembangunan Masyarakat Qur'ani, *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 23(1), 1–20. <https://doi.org/10.15575/anida.v23i1.22518>
- Rosidi, R., Nasution, N. A., Mubasit, M., & Solihin, M. I. (2023). Strategi dan Implementasi Komunikasi Dakwah Persuasif di Komunitas Punk Hijrah Bandar Lampung, *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 23(1), 21–36. <https://doi.org/10.15575/anida.v23i1.22698>
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat, *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan*

- PKN*, 7(1), 53–58. <https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.56445>
- Sarkawi, S. (2021). Dampak Wifi Bagi Pemuda Terhadap Sosial Keagamaan Desa Cibubukan Aceh, *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 3(2), 177–190. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v3i2.92>
- Sarkawi, S., & Ahmad, F. (2022). Memilih Pemimpin dalam Islam, *Idarotuna*, 3(3), 198. <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v3i3.14584>
- Sarkawi. (2023). Peluang Dakwah Melalui Tulisan dalam Konteks Kekinian, *Orasi: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 14(1), 59–69. <https://www.jurnal.syekhnrjati.ac.id/index.php/orasi/article/view/13264>.
- Suryanto, F. R. M. J. A. (2023). Konsep Keadilan Sosial dalam Sila Pancasila sebagai Upaya Mengatasi, *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(6), 8–13. DOI: <https://doi.org/10.56393/decive.v3i6.1655>.
- Usman. (2015). Negara dan Fungsinya, *Al-Daulah*, 4(1), 130–139. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1506/1445
- Yusdiyanto, Y. (2017). Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila dalam Sistem Demokrasi di Indonesia, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 259–272. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.623>